

Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat

Selvia Rahmah¹, Ikhsan^{2*}

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

¹ ikhsan.baharudin@utu.ac.id *

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 4 July 2022

Revised 26 July 2022

Accepted 29 August 2022

Keywords

Disaster mitigation,
Post-Disaster Handling

ABSTRACT

This study aims to see how the post-disaster management carried out by the BPBD of West Aceh Regency in post-disaster handling. This study uses a qualitative method with a case study approach. Research informants consisted of 5 (five) informants at the research location. The theory used is about disaster management, there are 3 stages with indicators of post-disaster rehabilitation and reconstruction coverage, among the three stages are (1) Pre-Disaster, (2) During the Event, and (3) Post-Disaster. The results of this study indicate that the Disaster Management of West Aceh District BPBD in Post-Disaster Handling has generally been carried out well. This rehabilitation and reconstruction process was carried out according to data sources from informants who worked at the BPBD of West Aceh Regency from 2017 to 2021. In 2017, the rehabilitation and reconstruction process was carried out on the construction of the bridge in Krueng Beukah Village, Pante Ceureumen District, in 2018 the process rehabilitation and reconstruction was carried out on the construction of riverbank cliff guards in Mesjid Tuha Village, Meureubo District, in 2020 economic recovery was carried out in the form of goods given to each shophouse in the fire accident on Jl. Blangpulo Ujung Kalak as a capital venture, in 2021 rehabilitation and reconstruction will also be carried out in the upper rehabilitation in the tornado disaster, precisely in Suak Ribe Village, Johan Pahlawan District, while in 2022 now the rehabilitation and reconstruction process is not carried out because considering the disaster that occurred in this year there is no need for a rehabilitation process and also budget problems which are obstacles in carrying out the post-disaster management process.

PENDAHULUAN

Penelitian ini tentang manajemen pasca bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat. Mitigasi merupakan langkah awal dalam siklus manajemen



DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776

Rahmah and Ikhsan, Manajemen Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat Dalam Penanganan Pasca Bencana (2022)

bencana. Langkah mitigasi adalah langkah yang menentukan berhasil tidaknya suatu proses penanggulangan risiko bencana, baik dalam proses pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana (Lestari 2021; Widiastuti, Wiguna, and Alit 2020). Mitigasi juga memiliki pengertian sebagai usaha dalam pengurangan serta pencegahan suatu bencana (Jufriadi 2012). Menurut Permendagri tentang penanggulangan bencana, mitigasi merupakan rangkaian usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana baik bencana alam, bencana karena ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya (Nurillah, Maulana, and Hasanah 2022). Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau kumpulan peristiwa membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan baik karena faktor alam ataupun non-alam dan faktor manusia, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian baik dalam hal korban jiwa, rusaknya lingkungan, dan juga efek psikologis pada manusia itu sendiri (Pahleviannur 2019). Menurut Nurillah, Maulana, dan Hasanah (2022), bencana didefinisikan sebagai suatu indikasi alamiah dan non-alamiah yang membuat masyarakat resah dengan dampak yang ditimbulkannya, mulai dari hilangnya kenyamanan, terganggunya keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, antara lain: banjir, tanah longsor, letusan gunung merapi, tsunami, banjir rob, dan kejadian benda-benda langit (Yusuf Falaq 2021). Bencana alam yang terjadi karena faktor manusia, diantaranya: bom nuklir, pencemaran lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air sungai, pembuangan limbah pabrik, dan lainnya.

Salah satu negara yang tidak terlepas dari musibah bencana adalah negara Indonesia, negara ini berada di bawah wilayah rawan akan bencana (Wardyaningrum 2014), sehingga sudah sepatutnya Indonesia melakukan mitigasi bencana secara baik. Kondisi geografis juga menjadi pendukung terjadinya bencana, karena pada dasarnya daerah kabupaten dan kota memiliki kondisi geografis yang bermacam ragam mulai dari daerah yang terletak di dataran tinggi hingga daerah yang terletak pada dataran rendah. Berikut data bencana yang dialami oleh Indonesia Tahun 2021 yang bisa kita lihat.



Gambar 1. Data Bencana Indonesia 2021

Sumber : (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022)

Sesuai dengan gambar 1, Indonesia mengalami bencana yang sangat merugikan masyarakat, di mana pada tahun 2021 mencapai 2.757 bencana. Kerugian yang dialami diantaranya: kerusakan rumah sebanyak 136.286, selanjutnya kerusakan fasilitas publik

seperti rusaknya fasilitas pendidikan (1.465), fasilitas peribadatan (1.818), fasilitas kesehatan (353), kantor (503), dan jembatan (401). Dengan melihat kondisi ini, perlu adanya manajemen mitigasi bencana.

Salahsatu kabupaten di Indonesia yang rentan terjadi bencana adalah Kabupaten Aceh Barat, diantara bencana tersebut adalah banjir, kebakaran, dan puting beliung. Bencana ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten. Dampak bencana ini setiap tahun membuat rugi masyarakat baik dari segi materi maupun psikologi. Seperti pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Barat, banjir merusak 80 unit rumah dengan kondisi 14 unit kategori rusak sedang, 26 unit rusak ringan dan sebanyak 38 unit ikut terdampak, bencana banjir juga menyebabkan 1.641 jiwa atau 437 kepala keluarga terdampak rendaman banjir. Sedangkan bencana kebakaran pada Juli 2020 menghancurkan 7 ruko di Jl. Blangpulo I, berdekatan dengan lokasi pasar tradisional dengan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Kemudian kebakaran juga terjadi di Kecamatan Meureubo pada bulan Maret yang membakar lahan, terjadi di dua titik dengan luas sebesar 1,9 Ha dan 1,5 Ha. Pada bulan Juni juga terdapat kebakaran lahan seluas 2,4 Ha dengan ketebalan gambut lebih dari 1 meter. Adapun bencana puting beliung terjadi pada tahun 2019 di Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, dampak material yang diakibatkan adalah 46 unit rumah dengan keadaan 16 unit rusak berat, 30 unit rusak ringan, sedangkan korban yang terdampak berjumlah 46 kepala keluarga dengan jumlah 157 jiwa (bpbd.acehbaratkab.go.id).

Dengan kondisi seperti ini maka pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi bencana yang akan terjadi kedepannya. Dengan begitu diperlukannya tanggap darurat bencana yang mempunyai makna sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam waktu cepat saat terjadinya bencana guna menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan seperti kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsian, serta pemulihan sarana dan prasarana (Sangadah and Kartawidjaja 2020; Setyowati 2019). Pada proses ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas untuk menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta memiliki fungsi yaitu mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, sehingga BPBD memiliki peran penting dalam melakukan manajemen bencana daerah. Oleh karena itu, sebelum menjalankan proses penanggulangan bencana maka dilakukannya manajemen mitigasi bencana dalam penanganan pasca bencana itu sendiri.

Adapun penelitian tentang manajemen bencana sudah dilakukan oleh beberapa penulis, Yusuf Falaq (2021), dan Nurillah, Maulana, dan Hasanah (2022), dan juga (Syahrillia 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan penanggulangan bencana melalui pendekatan manajemen mitigasi di kabupaten sudah terlaksana meskipun ada tahapan yang belum maksimal serta pada tahapan akhir di bidang pasca bencana masih adanya kekurangan dan masih tidak efektif, terutama pada proses rehabilitasi yang masih kurang tepat dan disebabkan oleh anggaran yang menurun, serta faktor-faktor yang menghambat jalannya proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Sedangkan dalam penelitian Nabila Hanun Zayain 1 (2020), hasil dari penelitian menunjukkan semua



komponen kebijakan sudah berjalan dengan baik, karena faktor sumber dana yang mencukupi sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat.

Menurut Mahardika dan Larasati (2015), manajemen bencana ada 3 tahapan dengan indikator cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diantaranya: (1) Pra Bencana, (2) Saat Kejadian, dan (3) Pasca Bencana. Fokus penelitian ini adalah pada tahap penanganan pasca bencana. Tulisan ini akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang manajemen penanganan bencana pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Penanganan Pasca Bencana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat. Bogdan dan Taylor dalam Ristiani (2020), penelitian kualitatif merupakan penulisan kata-kata ataupun ucapan serta ikut mengamati berbagai perilaku dari orang-orang. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengumpulkan informasi tentang gejala-gejala yang ada pada saat dilakukannya suatu penelitian (Zellatifanny dan Mudjiyanto 2018). Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena masalah yang terjadi sangatlah bermacam ragam sehingga untuk mengenali masalah yang terjadi dibutuhkan pemahaman lebih mendalam. Peneliti ingin memperoleh data yang lebih lengkap serta lebih mendalam terkait permasalahan penelitian.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer berupa wawancara dan observasi, data sekunder berupa mencari data dan informasi dari berbagai literature maupun referensi yang bersumber dari jurnal, buku, serta internet. Dalam wawancara ini informasi akan didapat dengan melakukan percakapan antara dua orang atau lebih dengan peneliti yang menanyakan terkait apa yang menjadi pertanyaan untuk informasi penelitian dan informan yang menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (Nabila Hanun Zayain 1 2020). Kemudian dilakukannya observasi dengan mengamati dan memperhatikan, oleh karena itu para peneliti akan melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat objek dalam penelitian tersebut. Adapun informan pada penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dengan melihat kesesuaian antara informan dengan informasi yang dibutuhkan dengan pertimbangan tertentu (Almanshur Fauzan 2012). Informan pada penelitian ini antara lain: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Analis Kebencanaan Ahli Muda, Pembantu Kasi Rekonstruksi, Pengelola Data Dampak Bencana, serta anggota Pusdalops BPBD. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Penanganan Pasca Bencana

Manajemen bencana merupakan ilmu pengetahuan yang mengamati tentang kebencanaan serta semua aspek yang berkaitan dengan adanya bencana, terutama dalam penanganan risiko bencana dan bagaimanakah menghindari bencana tersebut (Permana 2018). Mitigasi bencana itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk



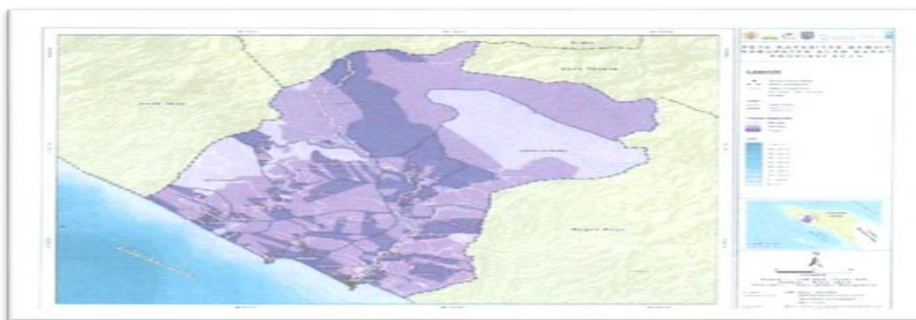
mengurangi risiko bencana baik pada pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana (Irawan, Subiakto, and Kustiawan 2022). Tingkat mitigasi dalam pengertian ini adalah cara untuk mengurangi konsekuensi dari bahaya dengan tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang akan dihadapkan kepada masyarakat dibandingkan dengan tindakan lainnya, seperti evakuasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Burhanudin Mukhamad Faturahman 2019). Oleh karena itu, mitigasi perlu dijalankan secara kolektif melalui agenda pemerintah, mitigasi juga perlu dilakukan dengan cara terpisah, baik itu pada saat sebelum kejadian, saat kejadian, maupun sesudah kejadian.

1. Pra Bencana

Pada tahap prabencana, proses kegiatan perencanaan dan penetapan tujuan meliputi kegiatan pembuatan peta rawan bencana. Peta rawan bencana merupakan peta wilayah yang menunjukkan adanya risiko bencana yang terjadi pada suatu daerah tertentu (Djalil, Sela, and Tilaar 2015). Peta yang bersifat dinamis ini tentu perlu dilakukannya perbaikan pada saat tertentu yang dibuat dalam bentuk gambar dengan adanya warna dan simbol untuk memahami isi peta tersebut (Nurillah, Maulana, and Hasanah 2022). Dengan adanya peta risiko bencana ini dan teknologi yang dapat mendeteksi bencana dini, berguna agar pemerintah dan masyarakat bisa saling mengkoordinasikan dalam upaya untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Lokasi rawan bencana ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Bukan hanya itu, keseriusan juga menjadi poin utama yang diperlukan untuk mengimplementasikannya.

Pemaparan di atas dalam menjalankan penanggulangan risiko bencana, seluruh stakeholder diharuskan untuk memahami di mana saja lokasi rawan bencana yang terdapat di wilayah tersebut agar memudahkan dalam proses penanggulangan bencana, khususnya dampak dari risiko bencana yang terjadi. Adapun peta wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

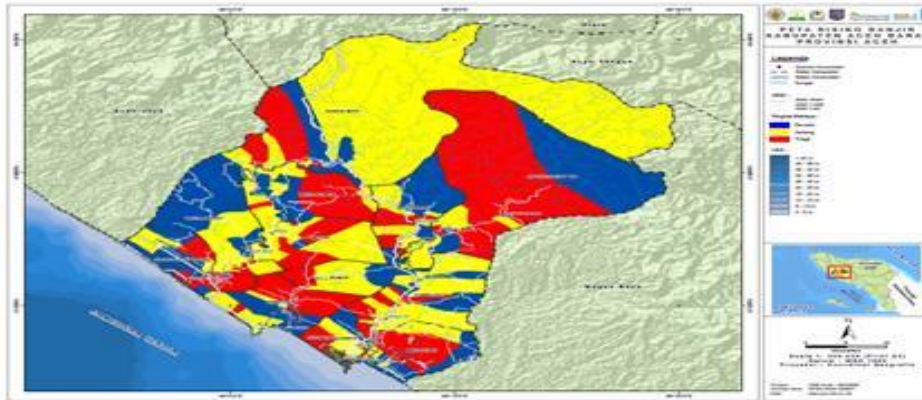
a. Peta Risiko Banjir Kabupaten Aceh Barat



Gambar 2. Peta Risiko Banjir

Sumber : (BPBD Kabupaten Aceh Barat)

b. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Aceh Barat



Gambar 3. Peta Risiko Kebakaran

Sumber : (BPBD Kabupaten Aceh Barat)

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen pada BPBD Kabupaten Aceh Barat terkait banjir, puting beliung dan kebakaran, baik itu terjadi pada rumah-rumah, lahan, dan lainnya. Berikut dipaparkan:

A. Bencana Banjir

Tabel 1. Data Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat 2018 dan 2021

Tanggal	Jenis Bencana Alam	KK	Jiwa
14 – 16 April 2018	Banjir	183	523
2 – 5 Oktober 2018	Banjir	396	1.353
16 Oktober 2018	Banjir	2.443	7.563
17 – 21 Oktober 2018	Banjir	4.653	7.563
28 Juli 2021	Banjir	3.640	4.544

Sumber : Pusalops BPBD Kabupaten Aceh Barat

Banjir merupakan suatu keadaan fenomena bencana alam yang mempunyai hubungan dengan kerusakan pada kehidupan masyarakat dan juga material yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Juliana et al. 2019). Bisa dilihat pada tabel 2 di atas bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2021 bencana banjir masih terus terjadi, melanda hampir semua kecamatan pada Kabupaten Aceh Barat, diantaranya: Kecamatan Sungai Mas, Kaway XVI, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, Pante Ceureumen, Panton Reu, Meureubo, dan Johan Pahlawan. Bencana banjir pada Kabupaten Aceh Barat sudah menjadi hal lumrah yang bisa dilihat setiap tahunnya, penyebabnya berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Fhyraz

selaku salah satu anggota Pusdalops Kabupaten Aceh Barat menyebutkan bahwa “Banjir terjadi akibat hujan di wilayah kabupaten Aceh Barat yang mengakibatkan meluapnya air sungai krueng woyla serta kreung meureubo, sehingga menggenangi pemukiman warga dan badan jalan setinggi ± 20 cm s/d 80 cm”. (Wawancara, 02 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

B. Bencana Puting Beliung

Tabel 2. Data Bencana Puting Beliung Kabupaten Aceh Barat 2021

Tanggal	Jenis Bencana Alam	KK	Jiwa
1 Oktober 2021	Puting Beliung	12	47

Sumber : Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat.

Angin puting beliung adalah angin ribut yang membentuk pusaran menjulang kelangit seperti corong dengan gerakan yang cepat dan berisiko tinggi pada daerah yang dilewatinya (Wibowo et al. 2020). Berdasarkan ungkapan dari Bapak Fhyraz selaku salah satu anggota Pusdalops Kabupaten Aceh Barat “Bencana angin puting beliung ini terjadi pada dua desa diantaranya Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan dan Desa Gunong Kleng Kecamatan Meureubo pada hari Jum’at pukul 8.00 WIB”. Dilanjutkan oleh Bapak Fhyraz, “kronologi terjadinya bencana angin puting beliung ini akibat hujan deras di sertai angin kencang, menyebabkan atap rumah warga di dua gampong serta sebagian atap di satu sekolah dasar (SD) rusak di terjang badai, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini” (Wawancara, 02 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

C. Bencana Kebakaran

Tabel 3. Data Bencana Kebakaran Kabupaten Aceh Barat 2020

Tanggal	Jenis Bencana Alam	KK
11 November 2019	Kebakaran	1
12 November 2019	Kebakaran	1
26 November 2019	Kebakaran	1
6 Juli 2020	Kebakaran	7

Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat.

Pada tabel 3, tanggal 6 Juli 2020 telah terjadi kebakaran yang cukup besar dan menghanguskan 7 ruko di Jl. Blangpulo I pada pukul 10.00 WIB. Lokasi kebakaran



merupakan daerah pusat penduduk dan perkotaan yang berdekatan dengan lokasi pasar tradisional dan terletak di wilayah Jl. Blangpulo Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan. Kebakaran yang menhanguskan 7 ruko ini termasuk toko perabot, 2 bengkel, buah, kelontong, batu cincin, dan nelayan.

Ketiga bencana di atas memerlukan penanganan melalui kegiatan Pencegahan dan Mitigasi. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan BPBD untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana dengan cara Pengurangan Resiko Bencana seperti pelibatan stakeholder, manajemen resiko bencana, dan strategi pengurangan resiko bencana (Widayati 2020). Sedangkan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan BPBD untuk mengurangi resiko bencana dengan pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana (Bongi, Rogi, and Sela 2020). BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan bencana dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta perlindungan dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Kemudian, melakukan perencanaan mitigasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pembentukan desa tangguh bencana. Kabupaten Aceh Barat ada 10 desa tangguh bencana dengan 2 kecamatan, diantaranya: (a) Kecamatan Johan Pahlawan: Desa Suak Ribee, Kuta Padang, Kampung Belakang, Ujung Kalak, Ujung Baroh, Rundeng, dan Lapang, (b) Kecamatan Meureubo: Desa Pasi Aceh, Meureubo, Langung, dan Peunaga. BPBD Kabupaten Aceh Barat juga melakukan simulasi serentak terkait peringatan hari kesiapsiagaan bencana, seperti yang dilakukan pada tanggal 26 April 2020 pada jam 10.00-12.00 lalu. Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat.

BPBD Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan 145 personel guna mengantisipasi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga menyiapkan sejumlah alat berat seperti empat unit perahu karet (rubber boat), excavator guna melakukan pengerukan muara sungai dan tanah longsor dalam menghadapi potensi bencana banjir di musim penghujan. Pengerukan muara sungai dilakukan di Desa Ujung Kalak dan Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan bertujuan melancarkan aliran air di lingkungan masyarakat, sehingga saat hujan deras turun, aliran air di saluran (drainase) tidak tergenang dan mengalir lancar ke muara sungai. Seperti yang dikatakan oleh kepala pelaksana BPBD "Pada prinsipnya BPBD Aceh Barat selalu siap siaga dalam menghadapi potensi bencana, seperti di musim penghujan saat ini". Adapun BPBD dalam mengendalikan dampak bencana adalah dengan selalu mensiagakan regu-regu TRC yang bertujuan untuk melakukan berbagai upaya agar masyarakat mendapatkan pertolongan langsung, dan BPBD langsung mengendalikan tahap awal bencana seperti evakuasi dan pemetaan daerah bencana.

2. Saat Terjadi Bencana

Menurut Nurjanah, dkk (2012), tanggap darurat adalah sesuatu yang harus dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang merugikan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat pada saat terjadinya bencana banjir, puting beliung, dan kebakaran dengan mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penyelamatan dan evakuasi korban manusia (jiwa raga), perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan



kebutuhan dasar. Kemudian BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan penunjang dari kedaruratan dengan cara pemberian logistik kepada korban bencana. Pemberian logistik kepada korban bencana tersebut bertujuan agar korban yang berada di lokasi dapat mengungsi dengan tetap mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari yang normal. kemudian untuk memenuhi kebutuhan makanan lanjut, BPBD membuka dapur umum dengan melibatkan sejumlah petugas dari instansi lain seperti Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas) dan Search and Resque (SAR) atau Badan SAR Nasional (Basarnas).

3. Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan proses tanggap darurat sudah dijalankan maka tahap selanjutnya adalah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh Bidang III pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat.

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan pada segala aspek pelayanan masyarakat sampai di tingkat yang lebih memadai pada daerah pasca bencana dengan menormalkan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Rekonstruksi itu sendiri adalah proses membangun kembali semua sarana dan prasarana. Maka dari itu, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dilakukan setelah terjadinya bencana sesuai dengan kebutuhannya. Dilihat dari beberapa bencana di atas seperti banjir, puting beliung, dan kebakaran maka upaya yang telah dilakukan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat adalah pembuatan jembatan Desa Krueng Beukah Kecamatan Pante Ceureumen pada Tahun 2017 lalu. Berdasarkan ungkapan dari Ibu Irna Agustina, ST selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kabupaten Aceh Barat “Akibat diterjang oleh banjir salah satu jembatan beton yang berada di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pante Ceureumen ini mengalami kerusakan berat pada bagian bawah jembatan akibat kikisan air yang mengakibatkan tanah di bawah jembatan itu ambruk sehingga badan jembatan jebol” (Wawancara, 06 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat). Dengan demikian proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan pada pembuatan jembatan, menurut sumber data yang didapatkan pada hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Pembantu Kasi Rekonstruksi “Jenis jembatan yang dilakukan perbaikan adalah jenis jembatan beton dengan panjang 12 meter dan lebar seluas 6 meter”. (Wawancara, 07 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

Pada tahun 2018 dilakukan juga proses rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu pembuatan pengaman tebing pinggir sungai pada Desa Mesjid Tuha Kecamatan Meureubo, hasil data ini juga diperkuat dengan ungkapan Bapak Syarifuddin selaku Pembantu Kasi Rekonstruksi “Pembuatan pengaman tebing pinggir sungai dengan bronjong ini dilakukan karena terkikisnya tanah pada tebing sungai yang disebabkan oleh aliran air sungai yang terlalu kuat dan juga bisa disebabkan oleh menurunnya kemampuan tanah untuk meresap air yang sangat berdampak pada lingkungan sekitar seperti jatuhnya lahan yang ada pada daerah



sungai tersebut seperti di desa Mesjid Tuha itu sendiri banyak lahan bahkan beberapa pohon kelapa sawit dibelakang rumah warga itu sendiri ambruk ke dalam sungai, pengaman tebing ini dibuat dengan panjang 150 meter dan tinggi 5 meter. Dengan pembuatan pengaman tebing ini diharapkan kikisan tanah tidak terjadi lagi”. (Wawancara, 07 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

Menurut ungkapan dari Ibu Irna Agustina, ST selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kabupaten Aceh Barat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan di beberapa rumah yang terkena musibah bencana angin puting beliung “proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan dengan merehap atap pada 3 rumah yang terkena musibah bencana puting beliung tepatnya di Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan” (Wawancara, 10 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

Pada musibah kebakaran yang terjadi di 7 ruko Jl. Blangpulo Ujung Kalak Tahun 2020 rehabilitasi di lakukan dengan pemulihan ekonomi. “Kebarakan yang menghancurkan 7 ruko diantaranya 2 usaha bengkel, usaha kelontong, usaha perabot, usaha batu cincin, nelayan dan juga usaha jual buah masing-masing diberikan modal usaha sesuai dengan usaha yang dijalankannya”. Data ini diambil berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Pembantu Kasi Rekonstruksi. (Wawancara, 07 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

B. Upaya Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat

Dalam menanggulangi permasalahan yang ada pada manajemen mitigasi bencana, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat mulai dari upaya dilakukannya regulasi kebijakan, pelatihan, serta diadakannya desa tangguh bencana. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat ini adalah dengan dilakukannya salah satu pelatihan yaitu pelatihan JITUPASNA. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) ini adalah salah satu pelatihan yang dikhususkan pada bagian penanggulangan pasca bencana, pelatihan ini bertujuan untuk melihat rangkaian proses pengkajian dan penilaian baik pada kerusakan, kerugian, serta pada kebutuhan yang akan dilakukan (Cookson and Stirk 2019). Ruang lingkup pada Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) ini menyangkut tentang penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdapat dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, lintas sektor, perumahan/permukiman, dan kemanusiaan (BPBA 2019).

Upaya lainnya juga dilakukan dengan mitigasi bencana dalam bentuk diadakannya desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana merupakan desa yang mempunyai kemahiran untuk mengenali risiko pada daerah tersebut serta mampu meningkatkan kapasitas guna untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Diadakannya desa tangguh bencana ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami risiko apa saja yang akan dihadapi ketika terjadinya bencana pada wilayah itu sendiri, dan bagaimana cara menghadapi kondisi pasca bencana itu. Dalam upaya ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat memberikan pemahaman berupa pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pendampingan dalam proses pelaksanaan kegiatan mulai dari langkah persiapan, perencanaan, hingga langkah pembangunan.



C. Kendala dalam Penanganan Pasca Bencana oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat

Dalam melaksanakan penanganan untuk meningkatkan tahapan pada proses penanganan pasca bencana, BPBD Kabupaten Aceh Barat mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan penanganan tersebut. BPBD Kabupaten Aceh Barat mendapatkan kendala terkait kurang dan lamanya proses pencairan anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat menghambat proses jalannya penanganan pasca bencana itu sendiri, sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Irna Agustina, ST selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda “Dalam proses pelaksanaan penanganan pasca bencana untuk anggaran yang diperlukan pada tahun lalu itu tidak sepenuhnya diberikan kepada bidang III rehabilitasi dan rekonstruksi, melainkan anggaran tersebut difokuskan pada bidang kedaruratan dan logistik mengingat pada tahap terjadinya bencana banyaknya risiko yang akan terjadi kapan saja”. (Wawancara, 14 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat). Untuk itu dibutuhkannya langkah dalam melakukan pemberdayaan pasca bencana, karena pemerintah dan juga masyarakat acuh terhadap penanganan pasca bencana ini dengan pemikiran bahwa pemerintah dan masyarakat telah selesai melakukan upaya pertolongan pada tahap tanggap darurat dan juga telah memberikan bantuan kepada korban (Bahransyaf 2008).

Sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Aceh Barat ini menjadi kunci utama terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian kendala selanjutnya yang dialami pada BPBD Kabupaten Aceh Barat ini kurangnya anggota dan rendahnya keterlibatan aparatur dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Manajemen Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Penanganan Pasca Bencana secara garis besar sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: (a) Proses rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana BPBD Kabupaten Aceh Barat telah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pembuatan jembatan, pengamanan tebing pinggir sungai, pemulihan ekonomi berupa barang untuk musibah kebakaran, dan lainnya dari tahun 2017 hingga tahun 2021, (b) Mitigasi bencana dalam penanganan pasca bencana, BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan regulasi kebijakan, pelatihan serta diadakannya desa tangguh bencana. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan pasca bencana seperti terbatasnya anggaran dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, minimnya kuantitas sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Aceh Barat serta rendahnya keterlibatan aparatur dalam proses pengambilan keputusan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Teuku Umar yang telah mendukung penelitian dan penulisan artikel ini.



REFERENSI

- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bahransyaf, Daud. 2008. "Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Berbasis Penelitian." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 14 (01): 47–56.
- Bongi, Anastasia, H A Octavianus Rogi, and Rieneke L E Sela. 2020. "Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Kota Makassar." *Sabua : Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur* 9 (1): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/31720>.
- BPBA. 2019. "Modul Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana," 77.
- Burhanudin Mukhamad Faturahman. 2019. "KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Burhanudin" 3: 1–19.
- Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk. 2019. "STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN PATI," 1–11.
- Djalil, Apriska Giofani, Rieneke L Sela, and Sonny Tilaar. 2015. "EVALUASI PERUNTUKAN LAHAN DAN PEMETAAN ZONASI TINGKAT RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNG API GAMALAMA DI KOTA TERNATE (Studi Kasus : Gunung Api Gamalama, Kota Ternate)." *Spasial : Perencanaan Wilayah Dan Kota* 2 (3): 11–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9668>.
- Irawan, Irawan, Yuli Subiakto, and Bambang Kustiawan. 2022. "Manajemen Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi." *PENDIPA Journal of Science Education* 6 (2): 609–15. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.2.609-615>.
- Jufriadi, Akhmad. 2012. "Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gempa Bumimelalui Campus Watching Sebagai Pendidikan Mitigasi Bencana (Studi Kasus Gedung Graha Saintha Lt.1 Universitas Brawijaya)." *Erudio Journal of Educational Innovation* 1 (1). <https://doi.org/10.18551/erudio.1-1.10>.
- Juliana, Imroatul C, Reini S Ilmiaty, Agus L Yuono, Riani Muharomah, and Taufik Ari Gunawan. 2019. "Penyuluhan Dan Pendampingan Manajemen Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Warga Masyarakat Kelurahan Gandus Kota Palembang." *Prosiding Applicable Innovation of Engineering and Science Research* 2019: 935–43.
- Lestari, Zulvaningsih. 2021. "Jaringan Komunikasi Aksi Cepat Tanggap (Act) Dalam Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana Di Kota Palu." *Kinesik* 7 (3): 303–14. <https://doi.org/10.22487/ejk.v7i3.133>.
- Mahardika, Dio, and Endang Larasati. 2015. "MANAJEMEN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KOTA SEMARANG Dio Mahardika , Endang Larasati Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro." *Fakultas Ilmu*



Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dipoengoro.

- Nabila Hanun Zayain 1, Slamet Muchsin 2 Retno Wulan Sekarsari 3. 2020. "Evaluasi Kebijakan Bencana Alam (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir Di Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia LPPM Unisma Jl . MT Haryono 193 Malang." *Jurnal Respon Publik* 14 (1): 50–59.
- Nurillah, Syifa, Delly Maulana, and Budi Hasanah. 2022. "Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Di Kecamatan Ciwandan." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 3 (1): 334–50. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613>.
- Nurjanah dkk. 2012. *Manajemen Bencana. Bandung:*
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. 2019. "Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29 (1): 49–55. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203>.
- Permana, Saraswati Ayudina. 2018. "Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis Di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5 (3): 148–55.
- Ristiani, Ida Yunari. 2020. "Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 2 (2): 126–38. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113>.
- sangadah, khotimatus, and Jesslyn Kartawidjaja. 2020. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik." *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21 (1): 1–9.
- Setyowati, D. L. 2019. *Pendidikan Kebencanaan*. Universitas Negeri Semarang.
- SYAHRILLIA, LIVIA PUTRI. 2022. "PELAKSANAAN PENANGANAN PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU." *Doctoral Dissertation, IPDN*.
- Wardyaningrum, Damayanti. 2014. "Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi Mitigasi Bencana Di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi." *Jurnal ASPIKOM* 2 (3): 179. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i3.69>.
- Wibowo, Yunus Aris, Ratih Puspita Dewi, Lintang Ronggowulan, Rhizki Yulia Anjarsari, and Yunita Miftakhunisa. 2020. "Penguatan Literasi Mitigasi Bencana Angin Puting Beliung Untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Munggur, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah." *Warta LPM* 23 (2): 165–79. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10571>.
- Widayati, Rina Sri. 2020. "Studi Kajian Peran BPBD Dan Aisyiyah Disaster Action Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Surakarta." *Gaster* 18 (1): 108. <https://doi.org/10.30787/gaster.v18i1.549>.
- Widiastuti, Ida Ayu Eka, Putu Aditya Wiguna, and Ida Bagus Alit. 2020. "Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Bagi Mahasiswa Ksr-Pmi Dalam Upaya Meningkatkan Peran Generasi Muda Dalam Penanggulangan Bencana." *Abdi Insani* 7 (3): 298–303. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.356>.
- Yusuf Falaq. 2021. "Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Desa Niaso Muaro Jambi." *Proceeding the 1th NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling Volume 01 No 01*



Tahun 2021, 71-80 01 (01): 80.

Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. 2018. "The Type of Descriptive Research in Communication Study." *Jurnal Diakom* 1 (2): 83–90.

